

REFORMASI BIROKRASI

OLEH :

HARIYADI B. SUKAMDANI

WAKIL KETUA UMUM

KADIN INDONESIA

Prinsip Dasar

- Reformasi birokrasi harus membuktikan kinerjanya yang baik dalam memberikan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Buruknya kinerja birokrasi akan mengancam demokrasi yang melandasi sistem ketatanegaraan.
- Dalam sistem pemerintahan yang sudah terdesentralisasi, segala upaya reformasi birokrasi harus menempatkan pemerintah daerah sebagai bagian terpenting perbaikan kinerja pemerintahan. Pemerintah pusat lebih berfungsi untuk menentukan norma, standar, monitoring dan evaluasi secara nasional untuk menjamin bahwa masyarakat mendapatkan standar pelayanan minimum di seluruh Indonesia.

Permasalahan Birokrasi saat ini :

1. Rendahnya kualitas SDM yang meliputi mayoritas aparat birokrasi.
2. Disiplin, semangat kerja dan kesadaran atas tugas serta tanggung jawab yang rendah.
3. Kurang memahami fokus tujuan dari tugasnya, banyak yang berprinsip “yang penting prosesnya benar tapi tidak peduli bila tujuannya tidak tercapai”
4. Lemahnya fungsi koordinasi.
5. Organisasi birokrasi sangat gemuk dan memakan anggaran yang besar.
6. Masih tingginya budaya korupsi.
7. Pemahaman yang rendah atas tugasnya sebagai Pelayan Publik.

Ilustrasi Anggaran Belanja Pegawai Pemerintah :

Anggaran Rutin

Th 2005	Rp. 54,254 T
2006	73,252 T
2007	90,424 T
2008	112,829 T
2009	133,709 T
2010	161,700 T

(rata2 kenaikan 25,4% per th)

Perkiraan Jumlah PNS, TNI & Polri \pm 5 juta orang

Anggaran Manfaat Pensiun

Th 2007	Rp. 27,6 T
2008	33,3 T
2009	39,8 T
2010	48,9 T

(rata2 kenaikan 21% per th)

Kenaikan upah terendah Pegawai Pemerintah :

- PNS gol I/a belum kawin th 2005 Rp. 674.000,- menjadi Rp. 1.721.000 pada th 2009
- Guru gol II/a belum kawin th 2005 Rp. 1.002.000,- menjadi Rp. 2.306.000,- pada th 2009
- TNI / Polri pangkat Tamtama / Bintara th 2005 Rp. 1.271.000 menjadi Rp. 2.296.000,- pada th 2009

Ilustrasi Rata2 Upah Minimum Nasional :

Th 2005	Rp. 507,697
2006	602,702
2007	672,480
2008	756,612
2009	816,984

Rata2 kenaikan UM : 12,7%

Pekerja di sektor formil \pm 28 juta orang

Peserta Jamsostek total \pm 26 juta orang

Peserta aktif Jamsostek 8,5 juta orang dengan dana kelolaan total Rp. 72 T

Strategi

- Perbaiki ujung terdepan pelayanan yang langsung berinteraksi dengan kebutuhan masyarakat.
- Memastikan ('memaksa') reformasi birokrasi melalui kontrol/alokasi anggaran.
- Penerapan *re-inventing governance* untuk memastikan profesionalisme birokrasi.

Lingkup Reformasi

- Restrukturisasi organisasi birokrasi internal kementerian, lembaga dan pemda sesuai fungsi agar birokrasi 'ramping struktur kaya fungsi'; dan agar ada penghematan biaya birokrasi (*note*: beberapa daerah menghemat 20-30% anggaran dari perampingan birokrasi – yang sangat berarti untuk dialokasikan bagi program pembangunan). Pemangkasan struktur organisasi bisa dilakukan atas duplikasi struktur yang tersebar di berbagai kementerian lembaga dan pemda; misalnya: fungsi pengawasan/*review* perda yang saat ini ada di Depdagri, Depkeu, Bappenas, BKPM, Setneg, Depkumham; bila perlu dihapuskan beberapa fungsi tersebut.
- Perampingan birokrasi sangat dimungkinkan karena ada dasar hukumnya yaitu UU No. 43 / th 1999 Tentang Pokok2 Kepegawaian (perubahan atas UU No. 8/th1974) pasal 23 ayat 2C mengenai pemberhentian dengan hormat karena perampingan organisasi pemerintah.
- Reformasi pegawai negeri secara menyeluruh mencakup: sistem rekrutmen, penilaian kinerja, peningkatan kapasitas, jenjang karier, pengawasan, dan remunerasi. Termasuk di dalamnya adanya status 'pegawai negeri nasional' pada tingkat (eselon) tinggi (I dan II) yang secara mudah dapat ditugaskan di kementerian lembaga dan daerah daerah sesuai kebutuhan.
- *Re-inventing governance* dengan identifikasi jenis jenis pelayanan yang bisa dilakukan sepenuhnya oleh swasta, atau swasta kerjasama dengan pemerintah – *run by private finance by government* (misalnya untuk fungsi promosi investasi, dll.). Termasuk dimungkinkannya para profesional diluar pegawai negeri untuk menduduki jabatan jabatan pemerintahan dalam pelayanan birokrasi (misalnya untuk fungsi pengembangan ekspor, dll.).

- Diterapkannya *reward & punishment* fiskal bagi pemda dalam hal reformasi birokrasi.
- Pemangkasan/sinkronisasi program; misalnya: *review* atas pemekaran yang dilakukan Depdagri, Bappenas, BPK, Dll. bisa disinkronkan melalui kerjasama yang baik agar tidak membuang buang anggaran.
- Diterapkannya program-program *quick win* untuk menumbuhkan optimisme keberhasilan reformasi birokrasi (misalnya: *one stop service* perizinan usaha yang baik, pemisahan fungsi kebijakan & pelayanan dalam perpajakan, , dll.).
- Diperlukan identifikasi/prioritas pusat-pusat keunggulan (dapat sektoral atau spasial/daerah) yang didukung sepenuhnya oleh pemerintah untuk mencapai keberhasilan (tidak setengah hati). Misalnya, keunggulan agrobisnis (segala upaya dikerahkan untuk keberhasilannya).

Prasyarat

- *Political will* dan dukungan legislasi dalam reformasi birokrasi (note: kelengkapan UU Pelayanan Publik dan Kebebasan Memperoleh Informasi, harus menjadi prioritas prolegnas).
- Komitmen menyeluruh pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan, dan sanksi keras atas pelanggarannya melalui penegakan hukum.
- Diperlukan institusi/pihak diluar birokrasi yang langsung bertanggungjawab ke Presiden sebagai pengawas dan pendorong berjalannya/tercapainya target program program kementrian lembaga dan pemda.